

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1. Pengertian Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Menurut Zulkarnen, Penyaluran memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep distribusi. Secara umum, penyaluran dapat diartikan sebagai proses pemindahan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.¹ Mekanisme ini memainkan peran penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi, memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu, tetapi dapat tersebar secara lebih luas dan merata di tengah masyarakat. Dalam perspektif yang lebih luas, penyaluran atau distribusi merupakan suatu aktivitas yang berfungsi untuk mengalirkan sumber daya, baik berupa barang, jasa, maupun kekayaan dari individu atau kelompok, baik yang bersifat kepemilikan pribadi maupun publik, kepada pihak yang berhak menerimanya.² Tujuan utama dari proses ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan keseimbangan ekonomi, serta mendukung keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan.

Penyaluran pupuk bersubsidi merupakan rangkaian proses penyaluran pupuk yang mendapat dukungan subsidi dari pemerintah, dimulai dari

¹ Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., & Yuningsih, N., "Pengembangan supply chain management dalam pengelolaan distribusi logistik pemilu yang lebih tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu berbasis human resources competency development di KPU Jawa Barat", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), (2020), 222-243.

² Dewantara, A, "ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam)", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(01), (2020), 20-36.

produsen hingga sampai ke tangan petani atau kelompok tani yang memenuhi syarat penerimaan.³ Mekanisme ini dirancang untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat mendukung kelangsungan usaha pertanian mereka. Tujuan utama dari kebijakan subsidi pupuk ini adalah untuk meningkatkan hasil pertanian, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta memberikan dukungan nyata bagi para petani, khususnya mereka yang bergerak dalam sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Dengan adanya subsidi, diharapkan para petani dapat mengakses pupuk berkualitas dengan biaya yang lebih ringan, sehingga produktivitas pertanian dapat terus meningkat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.⁴

2. Fungsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Menurut Makhtunin. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyaluran pupuk bersubsidi memiliki beberapa fungsi utama yang bertujuan untuk mendukung sektor pertanian secara berkelanjutan, antara lain:⁵

- a. Meningkatkan daya beli petani terhadap pupuk.
- b. Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
- c. Mempermudah akses petani terhadap sarana produksi.
- d. Menstabilkan harga gabah agar sesuai dengan HPP.

³ Ependy, A., & Abubakar, R, "Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Kelompok Tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin", *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 9(2), (2022), 1-16.

⁴ Taufik, Y., & Daud, L, "Dinamika Penyediaan Pupuk Subsidi pada Usaha Tani Padi Sawah melalui Mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (Rdtk) di Kota Kendari: Bahasa Indonesia", *Jurnal Ilmiah Inovasi Dan Komunikasi Pembangunan Pertanian*, 1(01), (2022), 17-26.

⁵ Makhtunin, V, "Evaluasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Permentan Nomor 01 Tahun 2024 di Kabupaten Jombang", *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(1), (2025), 13–23.

- e. Memberdayakan petani dan kelompok tani.
- f. Menjamin distribusi pupuk hingga ke daerah terpencil.
- g. Menjaga kualitas pupuk sesuai standar nasional.

3. Manfaat Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil pertanian, membantu petani kecil, menjaga stabilitas harga pangan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan subsidi pupuk diterapkan dengan tujuan agar harga pupuk tetap terjangkau bagi petani, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan mereka.

Menurut Abdul Halim,⁶ beberapa manfaat dari pupuk bersubsidi antara lain:

a. Meningkatkan Produksi Padi dan Ketahanan Pangan Nasional

Subsidi pupuk membantu petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan produksi padi. Ini penting untuk menjaga ketersediaan beras nasional di tengah meningkatnya kebutuhan penduduk.

b. Meringankan Beban Pembiayaan Petani

Harga pupuk bersubsidi jauh lebih murah dibanding pupuk non-subsidi. Misalnya, urea bersubsidi hanya Rp 2.250/kg dibanding harga non-subsidi Rp 5.000–6.000/kg, sehingga meningkatkan margin keuntungan petani.

⁶ Abdul Halim, Kartu Tani dan Pupuk Bersubsidi: *Kajian Pemanfaatan Pada Kelompok Tani di Kabupaten Maros*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), 3-4.

c. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani

Dengan biaya input yang lebih rendah dan hasil panen yang meningkat, program subsidi pupuk mendukung peningkatan pendapatan petani, terutama bagi petani kecil dan menengah.

d. Mendorong Pemerataan Ekonomi Pedesaan

Karena lebih dari 26% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian, manfaat subsidi pupuk turut menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, memperkecil kesenjangan ekonomi.

4. Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia merupakan suatu sistem yang diatur secara ketat oleh pemerintah guna menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani. Penyaluran ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023, yang menekankan pentingnya distribusi pupuk bersubsidi secara merata, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan petani.

Menurut Embang Herlambang,⁷ mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi wajib mengacu pada prinsip enam tepat, antara lain :

a. Tepat Jenis

Pupuk yang disalurkan harus sesuai dengan jenis yang dibutuhkan oleh tanaman dan kondisi lahan pertanian di masing-masing wilayah. Ketidaksesuaian jenis pupuk dapat menurunkan efektivitas pertumbuhan tanaman dan berdampak pada hasil panen.

⁷ Embang Herlambang, "Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023". *Jurnal Binamuliaa Hukum*, No. 1, Vol. 12, 2023

b. Tepat Jumlah

Alokasi pupuk harus disesuaikan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan oleh kelompok tani. Penyaluran pupuk yang tidak sesuai jumlahnya dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan yang merugikan petani dan menghambat produksi pangan nasional.

c. Tepat Waktu

Ketepatan waktu sangat krusial agar pupuk tersedia pada saat musim tanam dimulai. Peraturan mengharuskan rencana pengadaan disusun dan dilaporkan setiap awal musim tanam agar tidak terjadi keterlambatan yang berdampak pada keberhasilan produksi.

d. Tepat Mutu

Pupuk yang didistribusikan harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Mutu yang baik akan menjamin efektivitas pemupukan serta mencegah kerusakan pada lahan.

e. Tepat Sasaran

Pupuk bersubsidi hanya boleh disalurkan kepada petani yang telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan tergabung dalam kelompok tani. Hal ini untuk mencegah penyimpangan distribusi seperti penjualan kepada pihak tidak berhak atau spekulasi.

f. Tepat Harga

Penjualan pupuk bersubsidi wajib dilakukan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat petani dan mencegah

praktik penjualan di atas HET yang merugikan petani

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan aspek fundamental yang diidamkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara umum, kesejahteraan dapat diartikan sebagai kemampuan individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkualitas. Dalam ajaran Islam, sebagai agama yang sempurna, manusia dianjurkan untuk berusaha mencapai kehidupan yang sejahtera dan berkecukupan, baik dalam aspek materi maupun spiritual.⁸

Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, kesejahteraan didefinisikan sebagai upaya yang terorganisir, sistematis, serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai layanan sosial yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara itu,⁹ Badan Pusat Statistik (BPS) mendeskripsikan kesejahteraan sebagai suatu kondisi di mana seluruh kebutuhan manusia, baik yang bersifat fisik maupun mental, dapat terpenuhi sesuai dengan standar hidup yang layak. Mengingat cakupannya yang luas dan kompleks, kesejahteraan rakyat mencakup berbagai aspek kehidupan.¹⁰

⁸ Moehar Daniel, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 48.

⁹ Peraturan Menteri Sosial No. 3. Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasal 1 dan 2. Tahun 2021

¹⁰ Raja Masbar. dkk, *Komersialisasi Padi dan Beras Menuju Kesejahteraan Petani* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), 31.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan elemen krusial dalam menciptakan stabilitas ekonomi, baik dalam aspek material maupun non-material. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kedudukan sosial individu dalam lingkungan masyarakat. Untuk mengukur kesejahteraan sosial, terdapat sejumlah indikator yang menjadi tolok ukur dalam menilai kondisi kehidupan masyarakat secara objektif.

2. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat diukur menggunakan beberapa indikator, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan Rumah tangga dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut:¹¹

- a. Pendapatan Rumah Tangga, meliputi jumlah keseluruhan pendapatan anggota rumah tangga.
- b. Pengeluaran Rumah Tangga, meliputi total pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi seperti makanan dan bukan makanan.
- c. Kepemilikan Aset, meliputi kepemilikan rumah, kendaraan, tanah, dan barang berharga lainnya.
- d. Tingkat Pendidikan, meliputi pendidikan tertinggi yang di selesaikan oleh kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya

3. Kesejahteraan dalam Islam

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan dimaknai sebagai terwujudnya kemaslahatan, yang berlandaskan pada tercapainya tujuan syariat. Manusia tidak akan merasakan kebahagiaan sejati maupun ketenangan batin sebelum

¹¹ Badan Pusat Statistik. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. (Jakarta: BPS, 2021), 45.

kesejahteraan yang hakiki dapat diraih oleh seluruh umat manusia. Kesejahteraan ini hanya dapat terwujud melalui pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, yang selanjutnya mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) serta kehidupan yang baik dan bermartabat (*al-hayah al-tayyibah*).¹² selain itu, kesejahteraan juga bertujuan untuk merealisasikan prinsip-prinsip syariat dalam rangka menciptakan kemaslahatan umum, yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.¹³

Berdasarkan pendapat dari Imam Al-Ghazali, kesejahteraan masyarakat bertumpu dari pengaplikasian lima tujuan dasar, seperti agama (*ad-dīn*), hidup atau jiwa (*nafs*), keturunan dan keluarga (*nasl*), harta maupun kekayaan (*māl*), serta akal (*'aql*). Seperti dalil tentang kesejahteraan berikut:

وَمَقْصُودُ الشَّارِعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ : أَنْ يُحَفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَنَفْسُهُمْ وَعَقْلُهُمْ
وَنَسْلُهُمْ وَمَالُهُمْ

"Dan maqashid syara' atas makhluk ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka."¹⁴

Adapun yang dimaksudkan dari lima tujuan di atas, di antaranya:¹⁵

a. Kepercayaan (*ad-dīn*)

Menjalankan kewajiban agama merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang beriman. Kewajiban seperti

¹² Siti Achiria, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2020), 7.

¹³ Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam". *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syari'ah*, No.2, Vol.6, 2021.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 30

¹⁵ Adiwarwan A, Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 62

mendirikan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, serta melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan dan keutuhan agama itu sendiri.¹⁶ Jika kewajiban-kewajiban ini diabaikan, maka struktur nilai spiritual dalam kehidupan seseorang maupun masyarakat dapat runtuh. Agama hadir sebagai pedoman untuk menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kedamaian dalam kehidupan. Tanpa penerapan ajaran agama secara konsisten, kehidupan manusia bisa dipenuhi oleh kekacauan, kehilangan arah, dan kerapuhan moral. Oleh karena itu, memelihara eksistensi agama bukan hanya melalui keyakinan dalam hati, tetapi juga melalui pengamalan nyata dalam bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Setiap individu yang beriman dituntut untuk menjaga dan menghidupkan nilai-nilai agama agar tetap menjadi cahaya penerang dalam kehidupan pribadi maupun sosial.¹⁷

b. Kehidupan dan jiwa (*an-nafs*)

Perlindungan terhadap jiwa manusia merupakan aspek fundamental dalam menjaga keberlangsungan hidup. Salah satu cara utama untuk merealisasikan perlindungan tersebut adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar (primer) yang meliputi asupan gizi dan nutrisi yang memadai. Kebutuhan ini berperan penting dalam menjaga stabilitas biologis dan psikologis individu. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan primer, khususnya pangan, dapat menyebabkan

¹⁶ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Grup, 2011), 309.

¹⁷ Abd, Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta :Amzah, 2011), 309.

terganggunya keseimbangan tubuh serta meningkatkan risiko terhadap kerentanan jiwa, baik secara fisik maupun mental. Dalam kondisi demikian, manusia berada dalam situasi yang mengancam kelangsungan hidupnya secara langsung. Selain berfungsi sebagai sarana untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan terciptanya kesejahteraan individu, pemenuhan kebutuhan primer juga berperan strategis dalam mendukung kapasitas manusia untuk menjalankan peran sosialnya secara optimal. Hal ini termasuk perannya sebagai makhluk sosial dan pemimpin (khalifah) di muka bumi, yang membutuhkan kondisi fisik dan mental yang stabil serta sehat untuk berfungsi secara efektif dan bertanggung jawab.¹⁸

c. Akal dan pikiran (*al- 'aql*)

Akal merupakan karunia istimewa yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai pembeda utama antara manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, menjaga dan memelihara akal menjadi sebuah tanggung jawab yang esensial, mengingat akal memiliki peran sentral dalam membentuk integritas jiwa dan menentukan arah perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi utama akal tidak hanya terbatas pada proses berpikir semata, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menghasilkan manfaat yang luas bagi masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi memerlukan pemanfaatan akal secara optimal untuk merancang strategi, mengambil keputusan, serta mengelola

¹⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, 225.

sumber daya secara efisien. Namun demikian, penggunaan akal secara maksimal dalam bidang ini juga memerlukan dukungan dari pengetahuan dan wawasan yang memadai. Ilmu pengetahuan sebagai instrumen utama dalam pengembangan akal dapat diperoleh melalui berbagai aktivitas edukatif yang terstruktur, seperti pelatihan, seminar, workshop, atau kegiatan pembelajaran lainnya yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan keterampilan. Upaya-upaya tersebut secara tidak langsung merupakan bagian dari proses pemeliharaan akal, yang menjadi salah satu tujuan dasar dalam tatanan kehidupan manusia yang beradab dan beretika.¹⁹

d. Keturunan (*an-nasl*)

Keturunan merupakan aspek penting yang harus dijaga keberlangsungannya dan tidak boleh diabaikan dalam kehidupan. Dalam ajaran Islam, larangan terhadap perbuatan zina merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga kehormatan serta keutuhan nasab atau garis keturunan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keturunan sebagai bagian dari perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia. Secara hakikat, keturunan adalah penerus generasi yang memiliki potensi besar untuk membangun masa depan. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan pendidikan sejak usia dini, tidak hanya dalam hal pengetahuan umum, tetapi juga dalam penguatan nilai-nilai moral dan akhlak yang luhur. Penanaman nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk pribadi yang bermartabat, bertanggung

¹⁹ LN Anisa, "Integration of Umer Chapra's Islamic Economic Values in Indonesian Economic Policy," *Commodity Journal*, vol. 3, no. 1 (2024).

jawab, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.²⁰

e. Harta dan Kekayaan

Harta atau kekayaan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berperan penting dalam menunjang kelangsungan hidup. Dalam realitas sehari-hari, harta sering menjadi tujuan utama dalam berbagai aktivitas pekerjaan, karena darinya seseorang dapat memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan sosial. Upaya dalam menjaga dan memelihara harta tidak hanya terbatas pada kepemilikan semata, tetapi juga mencakup cara memperolehnya. Islam menekankan pentingnya mencari rezeki melalui jalan yang halal dan etis, yakni melalui aktivitas ekonomi yang sah dan tidak merugikan atau mengambil hak orang lain. Etika dalam memperoleh kekayaan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus bagian dari menjaga keberkahan harta yang dimiliki.²¹

²⁰ Ibid, 108

²¹ Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2019), 284.